

DAMPAK PERDAGANGAN SENJATA ILEGAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK DI NIGERIA

Rahmi Fitriyanti¹, Rafly Syauqi Rabbani²

FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta^{1,2}

Abstract

The proliferation of conventional and non-conventional weapons has raised international concerns since the end of the cold war, these weapons have become the main instrument of violence in ethnic and internal conflicts. This article focuses on the issue of light weapons and medium weapons (SALW) in Nigeria and its impact on national security. Nigeria faces challenges in reducing illegal arms trade. This article analyzes individuals involved in the illegal arms trade based on data on the distribution of SALW in Nigeria, the factors that drive the demand for light weapons and medium weapons among civilians, such as the inability of the police to maintain order and other criminal activities due to weak control management resulting in open access to illegal weapons in Nigeria. The consequences of illegal arms trade, include increased violence, terrorism, kidnappings, communal crises, and attacks on educational institutions. The analysis also explores the gender implications of arms expansion, such as violence against women and children and the Nigerian government's efforts to address this issue by establishing the National Center for Small Arms and Light Weapons Control.

Keywords: illicit arms trade, Nigeria, national security, illegal weapons circulation, women and children

Abstrak

Proliferasi senjata konvensional dan non konvensional menimbulkan kekhawatiran internasional sejak berakhirnya perang dingin, senjata itu menjadi instrumen utama kekerasan konflik etnis dan internal. Artikel ini fokus pada persoalan senjata ringan dan senjata sedang (SALW) di Nigeria dan dampaknya terhadap keamanan nasional. Nigeria menghadapi tantangan dalam mengurangi perdagangan senjata ilegal. Artikel ini menganalisis individu-individu yang terlibat diperdagangan senjata ilegal berdasarkan data peredaran SALW di Nigeria, faktor-faktor yang mendorong permintaan senjata ringan dan senjata sedang di kalangan warga sipil, seperti, ketidakmampuan polisi menjaga ketertiban serta kegiatan kriminal lainnya akibat pengelolaan kontrol yang lemah sehingga membuka akses senjata ilegal di Nigeria. Konsekuensi perdagangan senjata ilegal, termasuk peningkatan kekerasan, terorisme, penculikan, krisis komunal, dan serangan terhadap institusi pendidikan. Analisisnya juga mengeksplorasi implikasi gender dari perluasan senjata, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak serta upaya pemerintah Nigeria untuk menangani masalah ini dengan mendirikan Pusat Nasional Pengendalian Senjata Kecil dan Senjata Ringan.

Kata Kunci: perdagangan senjata ilegal; Nigeria; keamanan nasional; peredaran senjata ilegal; perempuan dan anak-anak

Copyright (c) 2024 Rahmi Fitriyanti¹, Rafly Syauqi Rabbani².

✉ Corresponding author : Rahmi Fitriyanti
Email Address : pipitfitriyanti77@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada era kontemporer, perdagangan dan peredaran senjata api menjadi permasalahan serius yang mengancam keamanan nasional Nigeria. Fenomena ini sangat memprihatinkan, mengingat terdapat lebih dari satu miliar senjata api yang beredar secara global pasca perang-perang besar yang pernah terjadi di dunia (*Small Arms Survey*, 2021). Lebih mengkhawatirkan lagi, data dari *Small Arms Survey* juga mengungkapkan bahwa sekitar 87,5 persen senjata tersebut berada di tangan warga sipil yang bukan merupakan pihak yang seharusnya memiliki senjata api.

Kawasan Afrika menjadi salah satu kawasan dengan peredaran senjata api di kalangan sipilnya yang paling besar di dunia. Hal ini tercermin dari tingginya peristiwa konflik yang terjadi di berbagai negara di benua ini, serta lemahnya otoritas penegak hukum yang mengawasi perdagangan senjata (*Small Arms Survey*, 2021). Di antara negara Afrika, Nigeria tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat peredaran senjata api ilegal tertinggi. Survei yang dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* menyatakan bahwa sekitar 70 persen atau sebanyak 350 juta dari 500 juta senjata ilegal yang beredar di kawasan Afrika terdapat di Nigeria (Punch, 2022).

Peredaran senjata api di Nigeria dilakukan melalui berbagai cara, termasuk perbatasan yang lemah, penyelundupan laut, ketididisiplinan aparat kepolisian, dan manufaktur senjata dalam negeri yang tidak terkendali (Guardian Nigeria, 2021). Senjata ilegal yang masuk ke Nigeria sering kali diselundupkan dengan menyamar sebagai barang dagangan seperti karung beras atau bal pakaian bekas dari negara lain. Selain itu, senjata hasil produksi lokal di Nigeria juga didistribusikan dengan menyembunyikan senjata di dalam kantong makanan pokok seperti singkong, kemudian disebar ke seluruh wilayah Nigeria (Guardian Nigeria, 2021).

Dampak dari peredaran dan perdagangan senjata api ilegal di Nigeria sangat merugikan dan menimbulkan berbagai kejahatan yang mengancam keamanan nasional. Penculikan, perampokan, pembajakan dan penyelundupan minyak, serta pembunuhan menjadi ancaman yang sering kali dihadapi oleh masyarakat Nigeria akibat mudahnya akses terhadap senjata dan amunisi ilegal (*Small Arms Survey*, 2021).

Konsekuensi ini berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Nigeria, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi langkah-langkah yang efektif dalam menangani permasalahan ini dan melindungi masyarakat Nigeria, khususnya perempuan dan anak-anak, dari dampak negatif peredaran senjata api. Untuk itu, artikel ini akan menganalisis dampak peredaran senjata api ilegal terhadap perempuan dan anak-anak di Nigeria. Termasuk berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi peredaran dan perdagangan senjata api ilegal di Nigeria.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif untuk menjawab dampak perdagangan senjata ilegal di Nigeria terhadap perempuan dan anak-anak. Metode kualitatif adalah metode yang menggunakan data berupa teks atau gambar, memiliki langkah unik dalam

melakukan analisis data, dan menggunakan desain yang beragam dalam melakukan penelitian (Creswell & Creswell, 2018).

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan melakukan metode studi kasus. Menurut Neuman (2014), metode studi kasus adalah suatu upaya yang secara intensif menyelidiki satu atau sekumpulan kasus dan berfokus pada banyak detail dalam setiap kasus dan konteksnya. Studi kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah tentang perdagangan senjata gelap di Nigeria dan bagaimana kasus tersebut mempengaruhi anak-anak dan perempuan.

Penelitian ini akan mengumpulkan data berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui metode *library research*, yaitu data riset kepustakaan, seperti, artikel jurnal, buku, skripsi, laporan resmi, laman web resmi, dan laporan berita berbentuk berita online maupun berita fisik dalam bentuk koran.

Data yang telah diperoleh kemudian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Proses ini dilakukan dengan melakukan segmentasi dan pemisahan data lalu menyatukannya kembali dengan mengambil sebagian penting dari data yang diperoleh terkait penelitian ini untuk memperoleh temuan hasil penelitian (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan Senjata Gelap di Nigeria dan Penggunaannya

Pada dasarnya, perkembangan senjata konvensional dan non-konvensional telah menjadi perhatian internasional sejak akhir Perang Dingin. Hal ini dikarenakan senjata-senjata telah menjadi alat utama kekerasan dalam banyak konflik etnis dan internal yang telah meletus dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat dua bentuk senjata yang umumnya diakses dalam konflik atau kejahatan ini. Pertama, tipe senjata kecil yang mengacu pada senjata genggam, seperti, senapan serbu, pistol, dan senapan mesin ringan; Kedua, tipe senjata ringan yang mengacu pada senjata yang mudah dibawa oleh kru, seperti, senapan mesin berat, bazooka, dan mortir ringan (August, 2016).

Majelis Umum PBB menekankan bahwa senjata-senjata ini telah membunuh manusia dengan sekitar 80% korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) A/RES/50/70 (1995) lebih lanjut mencatat bahwa senjata kecil dan senjata ringan (*Small Arms and Light Weapons / SALW*) mudah diakses dan mudah digunakan, dan bahwa SALW adalah satu-satunya instrumen ilegal di hampir semua konflik saat ini (Awotayo et al., 2022).

Hal ini kemudian berimplikasi pada upaya dunia internasional untuk mencegah dan memerangi perdagangan senjata gelap. Di tingkat global, terdapat dua proses negosiasi PBB yang berhubungan dengan hal ini. Proses pertama adalah "*The Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition (Firearms Protocol)*". Kedua adalah di mana negara-negara mengadopsi program aksi untuk mencegah, memerangi, dan memberantas "*The illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects*" (Greene, 2000). Kedua proses tersebut merupakan upaya untuk memerangi jaringan kriminal transnasional serta untuk mencegah dan mengurangi akumulasi yang berlebihan atas penyebaran ilegal senjata kecil dan senjata ringan dalam skala global.

Namun, hal ini tidak berimplikasi langsung pada pengurangan perdagangan senjata ilegal, terutama di wilayah zona konflik di kawasan Afrika. Tiga dealer terkenal terlihat dan terdaftar bertanggung jawab atas perdagangan senjata ilegal. Pertama, Victor Bout, yang memiliki lima maskapai penerbangan yang menerbangkan 60 pesawat, mempekerjakan sekitar 300 orang yang menjabat sebagai penyedia jaringan, menjembatani kesenjangan dalam rantai pasokan senjata ke titik tujuan. Kedua, Leonid Effimovich, broker utama dan dealer senjata yang didakwa atas proliferasi senjata di Afrika Barat. Ketiga, Geza Mezosy, seorang Belgia kelahiran Hungaria - Yugoslavia, yang mendirikan perusahaan "Eastronition", di mana Mezosy menjual senjata ilegal di Belgia, Luksemburg, dan Hongaria serta menjalankan kesepakatan senjata kotor dan mensponsori banyak geng pedagang senjata (August, 2016).

Surat kabar *online* Vanguard pada Februari 2018 menyatakan bahwa 640 juta SALW yang beredar di seluruh dunia, 100 juta diperkirakan berada di Afrika, 30 juta di Afrika Sub-Sahara, dan delapan juta di Afrika Barat. Mayoritas SALW ini berada di tangan sipil, yakni dengan 59 persen milik warga, 39 persen milik Angkatan Bersenjata pemerintah, 1,8 persen untuk polisi, dan 0,2 persen untuk organisasi bersenjata (et al., 2022). Terkait fakta tersebut, Nigeria menjadi salah satu dari banyaknya negara di Afrika yang mengalami krisis keamanan nasional di negaranya. Terutama sejak akhir Perang Saudara Nigeria (Biafra) pada 1970, di mana proliferasi senjata ilegal cenderung diterima begitu saja.

Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong permintaan senjata kecil dan senjata ringan di Nigeria oleh masyarakat sipil meliputi; ketidakmampuan polisi untuk menjaga hukum dan ketertiban, adanya ancaman terhadap keamanan pribadi, serta keuntungan pribadi baik secara individu maupun kolektif melalui perampokan bersenjata, bunkering minyak, serta kultus atau bentrokan dengan kelompok lain. Dengan demikian, keuntungan pribadi juga telah dicari oleh politisi yang mempersenjatai geng pemuda dan menggunakannya sebagai alat kampanye pemilihan pribadi (August, 2016).

Nigeria adalah sumber, transit, dan tujuan SALW, mulai dari jenis senjata AK-47s, Czech SAs, Light Machine guns, Czech model 26s, Stem MK 2s, Rocket Propelled Grenade (RPG), MAT-49s, MG 36s, Berettas, HK G3s, FN-FALs, senjata buatan sendiri, *pump-action*, dan senjata tembak, hingga senapan serbu dan bahan peledak canggih buatan Eropa lainnya (August, 2016). Meskipun Nigeria memproduksi senjata kerajinan oleh pandai besi lokal dan memiliki kapasitas produksi untuk senjata kecil melalui *Defence Industries Corporation of Nigeria (DICON)*, pandai besi di Nigeria tidak terorganisir atau diawasi sehingga mereka dengan cara apa pun dapat mendukung penyalahgunaan senjata. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa dalam beberapa tahun terakhir Nigeria lebih banyak menerima impor senjata daripada pembuatan senjata dalam negeri (Olayiwola, 2017).

Dari sisi geografisnya, Nigeria memiliki perbatasan sepanjang 770 km dengan Republik Benin, 1.500 km dengan Republik Niger, 1.700 km dengan Kamerun, dan 90 km dengan Chad. Nigeria juga berbatasan dengan Samudra Atlantik pada jarak 850 km. Perbatasan antara Nigeria dan negara-negara tetangganya memungkinkan perdagangan senjata dan produk ilegal lainnya dengan mudah masuk dari satu negara ke negara lain (Awotayo et al., 2022). Senjata ilegal menjadi lebih mudah untuk diakses karena manajemen kontrol

perbatasan yang buruk dan tidak memadai akibat kurangnya infrastruktur teknologi, tingkat korupsi yang tinggi, dan kurangnya personil di tingkat perbatasan.

Merujuk pada kasus Boko Haram di Nigeria, sebagian besar senjata dari organisasi militan ini memasuki negara melalui Dermaga Apapa. Mereka dievakuasi ke kapal tanker dengan diduga dibantu oleh beberapa anggota badan keamanan resmi. Beberapa sumber mengatakan bahwa rantai pasokan senjata Boko Haram berasal dari berbagai pangkalan militer dan polisi yang diserang pada puncak pemberontakan di Nigeria dan negara-negara tetangganya (August, 2016).

Sebagaimana fenomena akhir-akhir ini, proliferasi senjata kecil dan senjata ringan semakin berbahaya dan menjadi kejahatan transnasional terorganisir di Nigeria dengan pemberontakan Boko Haram, munculnya kembali krisis Delta Niger, meningkatnya penculikan, krisis komunal, dan perampokan bersenjata di Tenggara juga turut memberi dorongan pada peningkatan perdagangan senjata.

Boko Haram adalah organisasi militan dan teroris yang beroperasi dan bermarkas di Wilayah Timur Laut Nigeria. Dalam beberapa waktu terakhir, fokus utama dari kelompok ini tampak membingungkan karena membunuh orang Nigeria yang tidak bersalah alih-alih menyerang pejabat korup di pemerintahan, di mana awalnya mereka mengklaim bahwa kelompok mereka tidak membahayakan rakyat (Olayiwola, 2017). Kelompok ini juga terus memperluas kegiatannya ke negara bagian utara lainnya dan Wilayah Ibu Kota Federal. Ruang lingkup teritorial target serangan mereka juga terus berkembang hingga meluas ke institusi akademis yang diindikasikan oleh peristiwa pengeboman terhadap beberapa universitas Nigeria sehingga menyebabkan kerusakan berat dan hilangnya nyawa manusia.

Pada 2014, tercatat bahwa Boko Haram telah membunuh lebih dari 6.600 orang. Selanjutnya, kelompok ini telah melakukan penculikan massal, termasuk penculikan terhadap 276 gadis sekolah dari Chibok pada April 2014 (August, 2016). Di lain sisi, terdapat penggembala Fulani yang dalam banyak kasus tampaknya telah melebihi dampak dari ancaman Boko Haram itu sendiri.

Penggembala Fulani adalah penggembala semi nomaden. Karakter utamanya yang nomaden dengan tujuan mengejar lahan sayuran hijau dan akses air untuk ternak mereka selalu menyebabkan konflik antara penggembala dan petani (Awotayo et al., 2022). Para penggembala Fulani memiliki senjata yang sangat canggih. Kekejaman biadab yang telah diatur dan dilakukan oleh para gembala Fulani di Nigeria saat ini menjelaskan kecenderungan yang mengkhawatirkan terhadap akses yang tidak terbatas dan tidak terkendali terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata kecil dan senjata ringan.

Wilayah Delta Niger menjadi area lain dalam krisis ketidakamanan di Nigeria. Di wilayah Delta Niger Nigeria, pejabat lokal dan negara bagian, pemeras minyak lokal, pedagang minyak internasional, dan petugas keamanan adalah pemain penting dalam perdagangan senjata kecil dan senjata ringan, serta perang minyak (et al., 2022). Menurut pemerintah federal, sekitar 300.000 barel minyak per hari diangkut secara ilegal ke luar negeri. Akan tetapi, diperkirakan bahwa biaya yang sebenarnya mencapai antara USD1,5 miliar dan USD4 miliar (Olayiwola, 2017).

Sifat dan karakter politik minyak di wilayah tersebut telah mengakibatkan banyak persoalan, seperti, degradasi lingkungan, penculikan, perusakan fasilitas minyak, pencurian minyak, militansi pemuda, dan sebagainya. Ernest Toooh Aniche berpendapat bahwa degradasi lingkungan selama bertahun-tahun dan pengabaian total di wilayah Delta Niger menyebabkan munculnya banyak organisasi pemuda yang kemudian mengambil militansi sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan bagian yang adil dalam distribusi pendapatan minyak. Ketersediaan luas senjata ringan di wilayah Delta Niger merupakan tantangan khusus. Kriminalisasi dan ekonomi politik dari konflik di wilayah tersebut membentuk dasar bagi peningkatan kekerasan yang mengakar (The Guardian, 2021).

Dampak Perdagangan Senjata Gelap di Nigeria

Peredaran dan perdagangan senjata api dan amunisi di berbagai wilayah di Nigeria mengakibatkan terjadinya berbagai kejahatan yang mengancam keamanan nasional Nigeria, seperti, penculikan, perampokan, pembajakan, dan pembunuhan. Realitas menyedihkan ini memberanikan para penjahat, teroris, penggembala pembunuh, dan bandit yang memiliki akses yang mudah pada senjata ilegal untuk melakukan perbuatan keji. Mereka membunuh, memperkosa, menculik, dan menghancurkan wilayah dalam skala besar. Ketersediaan senjata dan amunisi yang mudah telah membuat situasi menjadi tidak aman di Nigeria. Besarnya angka perdagangan senjata mengakibatkan maraknya kejahatan, seperti penculikan. Lebih jauh lagi, hal tersebut berdampak kepada kehidupan masyarakat Nigeria. Menurut laporan *Indeks Terorisme Global*, Nigeria menduduki peringkat ketiga di antara negara-negara di dunia yang mengalami serangan teror terburuk (IEP, London, Inggris, Rabu (16/11)).

Saat ini, para penjahat di Nigeria yang memiliki akses ke senjata telah mengkhawatirkan. Para penyintas serangan milisi Fulani dan korban penculikan yang diselamatkan atau dilepaskan melaporkan bahwa para penjahat juga memiliki peluncur granat dan senapan mesin. Bahkan, para bandit menembak jatuh jet Angkatan Udara Nigeria sehingga membuat situasi makin mencekam. Sedangkan dari sisi kesehatan fisik dan mental yang dialami oleh warga sipil di Nigeria sebagai suatu negara miskin dengan tingkat ekspor senjata ilegal yang tinggi, terdapat perbedaan besar dalam kesehatan ibu dan anak antara 10 negara termiskin yang mengalami konflik pada tahun 2000 dan negara-negara kaya yang mengeksport senjata kepada mereka, baik itu secara langsung atau tidak langsung (*National Library of Medicine*, Table 2, 2002).

Perdagangan senjata internasional adalah substrat untuk konflik bersenjata global, menyebabkan penderitaan manusia yang sangat besar, serta ibu dan anak-anak adalah orang yang paling rentan. Dua juta anak tewas dalam konflik bersenjata, enam juta terluka parah atau cacat permanen, dan tak terhitung lainnya dipaksa untuk menyaksikan atau mengambil bagian dalam kekerasan. (Unicef, 1986 dan 1996). Sebagian besar korban adalah warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Menurut Machel, anak-anak dan non-pejuang lainnya selalu menjadi korban dalam perang. Akan tetapi, perang modern berimplikasi mengeksploitasi, melukai, dan membunuh anak-anak lebih kejam dari sebelumnya (Graça Machel, Unicef).

Efek tidak langsung dari konflik bersenjata menyebabkan kematian paling banyak pada ibu dan anak-anak. Selain itu, konflik bersenjata mengakibatkan (1) Kekurangan makanan; (2) Penyebaran penyakit; (3) Kerusakan psikologis dan emosional; (4) Disabilitas; (5) Pemisahan keluarga; (6) Kehilangan pendidikan; (7) Pelecehan seksual terhadap anak-anak, termasuk pemerkosaan yang disengaja untuk mengusir etnis minoritas; (8) Penculikan, penyiksaan, dan perbudakan anak; serta (9) Tentara anak-anak (NLOM., 2002).

Sedangkan konsekuensi lain dari konflik adalah mengakibatkan terjadinya perpindahan masyarakat secara massal. Pada 1997, sebanyak 13,2 juta orang menjadi pengungsi dan 4,9 juta menjadi pengungsi internal, lebih banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak dibandingkan dengan populasi awal. Di kamp-kamp pengungsi Rwanda, kematian anak mencapai 300 per 100.000 per hari. Kematian anak di komunitas pengungsi menunjukkan 60% lebih tinggi daripada di antara anak-anak nonpengungsi di negara yang sama. Sebaliknya, pada 2001, Amerika Serikat dan Inggris sebagai dua pengeksport senjata utama hanya menyediakan tempat berlindung bagi 4,3% dan 1,2% dari pengungsi dunia (yang berjumlah 12 juta) (*National Library of Medicine*, 2002).

Eksport senjata tidak dapat dikatakan secara langsung menjadi penyebabnya. Akan tetapi, konflik bersenjata dan perdagangan senjata dapat dilihat sebagai bentuk pelecehan ibu dan anak terlantar. Akibatnya, banyak anak-anak menjadi yatim piatu, kurang gizi, sakit, atau terbunuh sebagai konsekuensi dari perdagangan senjata tersebut.

Masih menurut laporan *National Library of Medicine*, tren proliferasi senjata di Nigeria telah berdampak pada keamanan internalnya sehingga menyebabkan kekerasan, kematian, dan cedera bagi ribuan warga yang tidak bersalah. Proliferasi senjata telah meningkatkan ketidakamanan dan menyebabkan lebih dari 80.000 kematian dan hampir tiga juta Pengungsi Internal atau IDP. Dampak dari proliferasi SALW melintasi perbatasan nasional di Afrika dan wilayah Sahel sehingga mengakibatkan penyebaran terorisme, perdagangan manusia, kejahatan terorganisir, serta berbagai pemberontakan di Afrika Barat dan Nigeria. Proliferasi senjata kecil selama dekade terakhir di Afrika merupakan dampak dari peristiwa di sub-wilayah Afrika Barat, khususnya Nigeria (Jenderal Abdulsalam Abubakar, 2021).

Dampak Proliferasi Senjata terhadap Ketidakamanan di Nigeria

Di Nigeria, SALW telah menyebabkan munculnya kelompok-kelompok bersenjata, penghancuran lebih dari 1.000.000 jiwa dalam 12 tahun terakhir, penghancuran besar-besaran aset di seluruh negeri, serta pemindahan manusia yang mengakibatkan pendirian kamp-kamp IDP di seluruh Nigeria. Proliferasi senjata juga mengakibatkan kematian aparat penegak hukum. Fenomena ini telah memicu bentrokan komunal, penculikan, kekerasan etnis dan agama, serta militansi di Delta Niger dan sekitarnya (*The Guardian*, 2021).

Proliferasi senjata memungkinkan penjahat Northwest untuk menentang daftar panjang operasi militansi, antara lain. Operasi Sahel Sanity, Operasi Hadarin Daji, dan sebagainya yang bertujuan mengusir mereka. Para teroris terus mengintensifkan operasi teroris mereka dengan peristiwa penculikan massal di Kankara, Negara Bagian Katsina; Negara Bagian Kagara Niger; Jangebe, Negara Bagian Zamfara (lebih dari 300 anak perempuan); Afaka,

Kaduna State (39 mahasiswa), dan yang lebih tragis Greenfield University Kaduna State (lima mahasiswa dieksekusi, satu mahasiswa dibebaskan, dan 17 mahasiswa serta guru masih ditahan (*The Guardian*, 2021).

Komplikasi lain dari penculikan Universitas Greenfield adalah bahwa hal itu tampaknya merupakan pekerjaan Ansaru. Ansaru adalah kelompok sempalan Boko Haram yang tampaknya merupakan kelompok pemberontak hibrida. Proliferasi senjata telah menghasilkan varian baru dari ancaman Boko Haram yang kini memiliki Boko Central yang dipimpin oleh Abubakar Shekau, ISWAP, Ansaru, Darul Salam.

Upaya kelompok-kelompok pemberontak hibrida untuk memisahkan diri dari Boko Haram terjadi ketika kelompok-kelompok di Tenggara, Barat Daya, dan Sabuk Tengah telah menyatakan keinginan untuk memecah-belah negara. IPOB baru-baru ini menyerang Penjara Owerri, membebaskan lebih dari 1.800 orang, membakar fasilitas tersebut, serta menyerang Markas Besar Polisi di Owerri. Banyak personel polisi telah ditembak mati di Timur. Namun, meski senjata dinas mereka disita, peredaran senjata justru semakin marak. Bahkan, para penggembala Fulani militan yang telah dinyatakan sebagai kelompok teroris paling mematikan keempat di dunia juga telah mampu mengambil alih seluruh komunitas di Sabuk Tengah dan Barat Daya dengan kekuatan senjata yang mengusir penduduk dari tanah leluhur mereka.

Konflik bersenjata juga mempengaruhi sebagian besar daerah pedesaan yang miskin. Hal ini secara signifikan telah mempengaruhi keselamatan manusia. Bahkan, dari beberapa kasus seperti pembunuhan terhadap para petani turut menjelaskan adanya konsekuensi dari ekspansi perdagangan senjata kecil dan senjata ringan. Penggunaan atau ancaman untuk menggunakan senjata konvensional, khususnya senjata kecil dan senjata ringan, secara konsisten menyumbang peningkatan kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap anak, dan pelanggaran hak asasi manusia. Meningkatnya ketersediaan persenjataan kecil dan ringan juga telah menambah tingkat kekhawatiran di Nigeria karena dapat dengan mudah digunakan oleh anak-anak.

Boko Haram adalah kelompok teroris agama yang menjadi terkenal di bawah kepemimpinan Mohammed Yusuf (1970-2002). Ideologi kelompok ini mendalami ajaran Islam Ortodoks yang mirip dengan ajaran Taliban di Afghanistan. Mereka memandang bahwa Barat adalah jahat dan tidak Islami. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa pengaruh Barat telah menyebabkan kelemahan Islam, karenanya institusi Barat dan cara hidup Barat harus dihindari oleh Umat Islam. Ideologi Boko Haram adalah bagian dari gerakan ideologis Islam Salafi Global, misalnya, berusaha untuk membersihkan Islam dari pengaruh luar dan berusaha untuk kembali kepada Islam berdasarkan ajaran "nenek moyang yang saleh", yaitu Nabi Muhammad dan komunitas Islam awal. Pandangan tersebut kemudian digunakan untuk melarang anak-anak pergi ke sekolah konvensional. Hal ini tentu berimplikasi pada larangan pendidikan berdasarkan metode Barat di Negara Bagian Utara Nigeria. Berdasarkan laporan UNICEF pada 2015, lebih dari 10,5 juta anak usia sekolah dasar tidak bersekolah, di mana lebih dari 60 persen dari anak-anak ini ditemukan di wilayah utara. Anak-anak ini merupakan anak-anak Almajiris, terpisah dari keluarga mereka dan berada di bawah perwalian Guru Islam. Anak-anak ini yang dilarang berada di bawah pengasuhan orang tua kemudian membentuk sebagian besar anggota

Boko Haram. Perekrutan anak-anak ini sering kali dilakukan dengan paksa. Berbagai aktivitas kejahatan yang dilakukan Boko Haram pada akhirnya menimbulkan ketakutan di benak orang tua, yang memilih alasan untuk menarik anak-anak mereka dari sekolah karena takut akan dibunuh oleh para pemberontak (Oshita & Ikelegbe, 2019).

Lebih dari itu, penculikan adalah masalah lama yang mengkhawatirkan secara global setelah abad ke-21. Namun, *Kidnapping for Random (K4R)* adalah salah satu industri kriminal yang tumbuh paling cepat secara global, termasuk Nigeria. Penculikan telah dilakukan untuk tujuan membalas dendam sebagai strategi politik para teroris, kekuasaan dan pengaruh, dan eksploitasi berupa meminta tebusan atau kekerasan seksual. Anak-anak sekolah, perempuan, pengusaha, politisi, pejabat pemerintah, diplomat, ekspatriat, tuan tanah, dan penguasa tradisional semakin menjadi sasaran geng-geng kriminal ini. Banyak keluarga telah kehilangan anggota keluarganya karena geng kriminal yang terlibat dalam K4R. Misalnya, salah satu gembong penculikan Nigeria yang paling ditakuti mengaku bahwa ia telah menculik dan membunuh 200 orang di seluruh negeri. Mereka telah menyebabkan anak tumbuh tanpa orang tua (Oshita & Ikelegbe, 2019).

Selain dampak yang sudah disebutkan sebelumnya, tantangan keamanan di Nigeria juga memiliki implikasi gender yang signifikan. Meskipun negara perlu mempertahankan diri dari agresi eksternal dan memberikan keamanan internal, seringkali pertimbangan gender tidak diprioritaskan dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi keamanan. Hal ini berkontribusi pada kurangnya perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan pelecehan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak, yang seharusnya dianggap sebagai tantangan yang perlu ditangani dalam manajemen keamanan di Nigeria.

Contoh konkret dari hal ini dapat ditemukan dalam kasus Delta Niger. Di daerah ini, perempuan berperan dalam banyak tugas, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya untuk menghidupi keluarga mereka. Namun, dalam situasi yang sulit seperti ini, perempuan sering menjadi target serangan dan teror oleh petugas keamanan, yang melihat mereka sebagai ancaman karena mereka memperjuangkan hak-haknya. Tindakan semacam ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan mengakibatkan peningkatan kasus penganiayaan dan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh anggota personel keamanan yang beroperasi di Delta Niger.

Dalam beberapa kasus, beban tambahan juga dialami oleh perempuan sebagai akibat dari kondisi sulit yang dihadapi oleh masyarakat Delta Niger. Misalnya, karena situasi yang tidak stabil, banyak suami di daerah tersebut melepaskan tanggung jawab perkawinan mereka kepada istri dan anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan peningkatan kasus janda dan menambah beban yang harus ditanggung oleh para perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga (Oshita & Ikelegbe, 2019).

Keadaan ini secara negatif turut mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi perempuan di Delta Niger, serta menempatkan mereka pada risiko yang lebih besar. Dalam konteks yang lebih luas, solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan perdagangan senjata ilegal dan dampaknya terhadap perempuan dan anak-anak di Nigeria memerlukan tindakan yang

komprehensif. Upaya penguatan kelembagaan, penegakan hukum yang efektif, dan kerja sama internasional dalam mengendalikan peredaran senjata ilegal harus menjadi prioritas. Selain itu, penting untuk mengatasi akar penyebab konflik dan ketidakstabilan di negara ini, termasuk masalah ekonomi, sosial, dan politik yang melibatkan partisipasi inklusif dari semua pihak terkait.

Dalam kesimpulannya, tantangan keamanan yang dihadapi Nigeria memiliki implikasi gender yang serius, yakni dengan menjadikan kaum perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif perdagangan senjata ilegal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan komprehensif yang mencakup perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan, pertimbangan gender dalam perencanaan operasi keamanan, pemberdayaan perempuan, penegakan hukum yang efektif, serta solusi jangka panjang untuk mengatasi akar penyebab konflik dan ketidakstabilan di Nigeria.

Upaya Menanggulangi Penyebaran Senjata Ilegal di Nigeria

Para ahli telah mengidentifikasi bahwa salah satu penyebab utama sulitnya mengentaskan penyebaran senjata ilegal di Nigeria adalah karena kurangnya undang-undang yang efektif dan mekanisme penegakan sebagai alasan utama proliferasi SALW sehingga berdampak besar yang mengakibatkan krisis, baik itu di dalam negeri maupun di banyak wilayah perbatasan nasional. Karena itu, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Nigeria untuk mengatasi senjata ilegal di negaranya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mendirikan Pusat Kontrol Senjata Kecil dan Senjata Ringan Nasional

Pembentukan *National Centre for the Control of Small Arms and Light Weapons (NCCSALW)* oleh pemerintah Nigeria pada 21 Mei 2021 merupakan langkah penting dalam mengatasi permasalahan perdagangan senjata ilegal di negara ini. NCCSALW berfungsi sebagai pusat pengendalian yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, melakukan penelitian, serta memantau semua aspek terkait senjata kecil dan senjata ringan di Nigeria (NCCSALW, 2021).

Dalam perannya sebagai *focal point* Nasional untuk SALW di Nigeria, NCCSALW memimpin proses multistakeholder yang melibatkan berbagai kementerian, departemen, badan, dan masyarakat sipil dalam melaksanakan rencana aksi nasional, serta mengadopsi pedoman dan kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh PBB dan *Economic Community of West African States (ECOWAS)* dalam pengendalian SALW.

Dengan pembentukan NCCSALW ini, Nigeria juga memenuhi persyaratan dari Moratorium ECOWAS tentang Impor, Ekspor, dan Pembuatan Senjata Kecil dan Senjata Ringan. ECOWAS sebagai organisasi ekonomi regional di Afrika Barat memiliki persyaratan bagi negara-negara anggotanya untuk memiliki lembaga pengawasan dan pengendalian senjata guna mencegah penyebaran senjata melalui kegiatan ekspor dan impor (Premium Times, 2021).

Dengan demikian, pembentukan NCCSALW di Nigeria menandai komitmen dan kepatuhan negara terhadap peraturan ECOWAS dan

rencana aksi internasional untuk mencegah, memerangi, dan memberantas perdagangan gelap senjata kecil dan senjata ringan.

Langkah ini memberikan dasar yang kuat bagi Nigeria dalam mengendalikan peredaran senjata ilegal dan menerapkan pengawasan yang ketat terhadap impor dan ekspor senjata. Selain itu, pendekatan multistakeholder yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga terkait juga memungkinkan adanya kerjasama yang efektif dalam mengatasi permasalahan keamanan terkait senjata ilegal, termasuk dalam melindungi perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan.

Namun, pembentukan NCCSALW hanyalah langkah awal. Implementasi yang efektif dari rencana aksi nasional, kerja sama regional, dan penegakan hukum yang ketat tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Nigeria. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk melaksanakan kebijakan dan program pengendalian senjata dengan tepat, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan mencegah perdagangan senjata ilegal.

Kesimpulannya, dengan pendirian NCCSALW, Nigeria telah mengambil langkah yang signifikan dalam mengatasi peredaran dan perdagangan senjata ilegal. Pusat pengendalian ini tidak hanya memenuhi persyaratan ECOWAS dan rencana aksi internasional, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah Nigeria dalam melindungi keamanan nasional serta melibatkan masyarakat dalam proses pengendalian senjata. Meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, setidaknya langkah ini memberikan dasar yang kuat untuk mengurangi peredaran senjata ilegal serta melindungi perempuan dan anak-anak dari dampak negatifnya.

2. Menerbitkan RUU Pengendalian Senjata Kecil dan Senjata Ringan

Di samping upaya pembentukan NCCSALW, Nigeria juga mendorong pengesahan RUU Pengendalian Senjata Ringan dan Senjata Ringan 2021 sebagai langkah konkret dalam mengatasi peredaran senjata api ilegal di negara ini. RUU ini diajukan sebagai RUU eksekutif di Majelis Nasional dan bertujuan memberikan landasan operasional bagi NCCSALW dalam melakukan pengendalian senjata kecil dan senjata ringan di Nigeria (PLACNG, 2021).

RUU tersebut memiliki beberapa poin penting yang mencakup berbagai aspek pengendalian senjata kecil dan senjata ringan maupun aturan mengenai senjata ringan di negara ini. Pertama, RUU ini bertujuan untuk mengontrol proliferasi senjata kecil dan senjata ringan di Nigeria. Hal ini akan mencakup pengaturan penjualan resmi dan transfer senjata api dan amunisi, serta pembuatan senjata ringan di dalam negeri.

Selain itu, RUU ini juga menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk koordinasi, implementasi, dan pemantauan semua upaya yang dilakukan dalam pengendalian senjata kecil dan senjata ringan di Nigeria. Dengan adanya kerangka kerja ini, diharapkan

koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan nonpemerintah dapat terjalin dengan baik untuk mencapai tujuan pengendalian senjata.

RUU Pengendalian Senjata Ringan dan Senjata Ringan 2021 juga menetapkan langkah-langkah untuk mencegah, memerangi, dan memberantas perdagangan gelap senjata kecil dan senjata ringan. Hal ini mencakup penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kepemilikan senjata api atau amunisi tanpa lisensi, serta tindakan kekerasan yang melibatkan senjata api. RUU ini juga menetapkan hukuman yang tegas, yakni dengan penjara mulai dari dua hingga enam tahun dan denda minimum hingga maksimum sebagai sanksi bagi pelanggaran tersebut.

Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh otoritas Nigeria, peredaran senjata api ilegal yang tinggi di seluruh negeri terus menjadi ancaman terhadap keamanan. Selain pengendalian dari sisi hilir, permasalahan peredaran senjata ilegal harus ditangani dari sisi hulu, yaitu mencegah masuknya senjata api ilegal ke dalam negeri. Sayangnya, menurut pakar keamanan dan Pemimpin Keamanan Intelijen SBM, Confidence McHarry, terdapat sekitar 1499 rute perbatasan ilegal yang dimanfaatkan oleh penyelundupan senjata api ilegal ke Nigeria. Masalah ini diperparah oleh kurangnya atau bahkan ketiadaan keamanan di perbatasan negara (ICIR, 2022).

Oleh karena itu, selain langkah-langkah yang diambil melalui NCCSALW dan RUU Pengendalian Senjata Ringan dan Senjata Ringan, diperlukan upaya yang lebih luas dan komprehensif untuk mengatasi peredaran senjata api ilegal di Nigeria. Penguatan keamanan di perbatasan, penegakan hukum yang lebih ketat, kerjasama regional dan internasional, serta kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menangani masalah ini. Selain itu, pendekatan yang holistik untuk mengatasi akar penyebab konflik dan ketidakstabilan di negara ini juga perlu diperhatikan untuk mengurangi permintaan akan senjata ilegal.

Dalam kesimpulannya, upaya Nigeria untuk mengatasi peredaran senjata api ilegal melalui pembentukan NCCSALW dan RUU Pengendalian Senjata Ringan dan Senjata Ringan 2021 adalah langkah penting dalam menangani masalah ini. Namun, tantangan yang dihadapi masih besar, terutama terkait dengan pencegahan masuknya senjata ilegal melalui perbatasan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan semua pihak terkait, baik itu Upaya di tingkat nasional, regional, maupun internasional guna mengendalikan peredaran senjata ilegal dan menjaga keamanan di Nigeria.

KESIMPULAN

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindakan proliferasi senjata telah menciptakan banyak dampak negatif di seluruh dunia. Di Nigeria, peredaran dan perdagangan senjata api dan amunisi di berbagai wilayah mengakibatkan terjadinya berbagai kejahatan yang mengancam keamanan nasional Nigeria, seperti, penculikan, perampokan, pembajakan dan pembunuhan, termasuk juga dalam menciptakan penderitaan yang mendalam terhadap perempuan dan anak-anak di Nigeria. Efek tidak langsung dari

banyaknya senjata ilegal yang beredar di negara tersebut menyebabkan kematian paling banyak pada ibu dan anak-anak, termasuk kekurangan makanan, penyebaran penyakit, mengganggu sistem kesehatan masyarakat, menyebabkan kerusakan psikologis dan emosional yang ditunjukkan oleh dua pertiga anak-anak Angola yang telah menyaksikan pembunuhan, disabilitas, pemisahan keluarga, kehilangan pendidikan, pelecehan seksual terhadap anak-anak, termasuk pemerkosaan yang disengaja untuk mengusir etnis minoritas, penculikan anak, penyiksaan, dan perbudakan tentara anak-anak. Setidaknya, pada 1998 terdapat 300.000 anak berusia di bawah 18 tahun adalah tentara. Selain itu, pengaruh negatif dari proliferasi senjata di Nigeria juga meluas ke sektor ekonomi dan pembangunan. Peredaran senjata ilegal telah menghambat investasi dan perkembangan ekonomi karena para investor khawatir dengan situasi keamanan yang tidak stabil. Hal ini berdampak pada penurunan lapangan kerja, pengurangan pendapatan, dan meningkatnya kemiskinan di banyak wilayah Nigeria. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Nigeria melakukan berbagai upaya seperti mendirikan Pusat Nasional untuk Kontrol Senjata Kecil dan Senjata Ringan (NCCSALW) dan mengeluarkan RUU Pengendalian Senjata Ringan dan Senjata Ringan.

Akan tetapi, berbagai upaya pengentasan penyebaran senjata ilegal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah jika upaya pencegahan terhadap masuknya senjata masih lemah. Sayangnya, keamanan di perbatasan Nigeria yang buruk telah menyebabkan besarnya arus masuk senjata ilegal ke negara tersebut. Selain pemerintah, partisipasi aktif dari masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, dan lembaga internasional juga sangat penting dalam upaya mengatasi masalah ini. Kolaborasi yang kuat antara semua pihak akan memperkuat upaya pengendalian senjata ilegal, mempromosikan perdamaian dan keamanan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Nigeria secara keseluruhan. Melalui berbagai langkah komprehensif dan kerjasama yang erat, Nigeria diharapkan dapat mengatasi masalah peredaran senjata ilegal dan mengurangi dampak negatifnya. Hanya melalui terciptanya lingkungan yang aman dan stabil bagi masyarakat Nigeria, maka Nigeria dapat melanjutkan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Bankole. (2022). Insecurity: A look at government recent attempts to curb unlawful firearms in Nigeria. Diakses dari <https://www.icirnigeria.org/insecurity-a-look-at-government-recent-attempts-to-curb-unlawful-firearms-in-nigeria/>, pada 6 Juli 2023.
- August. (2016). Global Trends in Arms Proliferation in Third World Countries and the Impending Apocalypse of the Human Race: A Case Study of Arms Race and Security Challenges in Nigeria. *International Journal of Innovative Research & Development*, 5(9), 192–205. www.ijird.com
- Awotayo, O. O., Akinrinde, O. O., & Oyebade, O. (2022). Proliferation of illicit arms and control mechanisms in Nigeria: A critical socioeconomic analysis. *Acta Politica Polonica*, 53(1), 5–14. <https://doi.org/10.18276/ap.2022.53-01>

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). RESEARCH DESIGN: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *SAGE Publications, Inc.*
- Greene, O. (2000). Examining international responses to illicit arms trafficking. *Crime, Law and Social Change*, 33(1-2), 151-190. https://doi.org/10.1007/978-94-015-9335-9_6
- Guardian Nigeria, How illicit arms is aiding insecurity in Nigeria [Video], 2 Februari 2021, Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=4Khsattf9N8> diakses dari <https://guardian.ng/saturday-magazine/insecurity-how-nigeria-can-curb-inflow-of-illicit-arms/> pada 06 Juli 2023
- Jooji (PhD), I., & Momoh, Z. (2022). The Devil's Theory of Imperialism and the Political Economy of Small Arms and Light Weapons (Salw) in Nigeria. *International Journal of Advanced Research*, 10(08), 903-911. <https://doi.org/10.21474/ijar01/15249>
- NCCSALW. (2021). Welcome to the National Centre for the Control of Small Arms and Light Weapons (NCCSALW). Diakses dari <https://nccsalw.gov.ng>, pada 07 Juli 2023.
- Olayiwola, S. (2017). Proliferation of Arms and Security Challenges in Nigeria. *International Journal of History and Cultural Studies (IJHCS)*, 3(3), 33-38. <http://dx.doi.org/10.20431/2454-7654.0303004>.
- Oshita, O. O., & Ikelegbe, A. O. (2019). An Overview of Theoretical and Practical Issues in Internal Security Management in Nigeria. In *Internal Security Management in Nigeria*. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8215-4_2
- PLACNG.org. (2021). President Buhari Presents Control of Small Arms and Light Weapons Bill. Diakses dari <https://placng.org/Legist/president-buhari-presents-control-of-small-arms-and-light-weapons-bill/> pada 21 Oktober 2022.
- Premium Times. (2021). Insecurity: Nigeria establishes centre to control small arms, light weapons. Diakses dari <https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/459130-insecurity-nigeria-establishes-centre-to-control-small-arms-light-weapons.html>, pada 06 Juli 2023.
- Punch Editorial Board, Effective control of illegal weapons, diakses dari <https://punchng.com/effective-control-of-illegal-weapons/> pada 06 Juli 2023.